



Transformasi Pendidikan Islam dalam Bayang-Bayang Kolonialisme: Studi Historis Masa Belanda dan Jepang

Rosdiana¹, Nurul Hasanah², Budihartono³, Nuscholis Azis⁴, Bahaking Rama⁵, Syamsuddin⁶
1,2,3,4, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Indonesia
5,6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

| 28

Email: rosdiana@iainsorong.ac.id¹, nurulhasanah.hdn@gmail.com², bmsauqy@gmail.com³,
nurchalisaziz92@gmail.com⁴, bahakingrama@yahoo.com⁵, syamsuddin.sasak@uin-alauddin.ac.id⁶

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 02, 2025

Revised April 12, 2025

Accepted April 1, 2025

Available online 23 Juni, 2025

Kata Kunci: *Islamic education, colonialism, Dutch, Japanese, educational history.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by KABARMOE

This study aims to explore the dynamics of Islamic education in Indonesia during the Dutch and Japanese colonial periods through a historical-critical approach. Islamic education played a vital role in preserving the religious and cultural identity of the Muslim community while also serving as a platform for resistance against colonialism. The Dutch colonial regime implemented repressive policies toward Islamic educational institutions, such as pesantren and madrasah, through regulations like the Teachers Ordinance and Wild Schools Act. In contrast, the Japanese occupation adopted a more accommodative and manipulative approach by incorporating Islamic symbols into their wartime propaganda strategy. This study employs a qualitative method based on literature review and historical document analysis. The findings indicate that despite differing political motives, Islamic education demonstrated both structural and cultural resilience. Under Dutch rule, Islamic education developed outside the formal state system, whereas under Japanese occupation, it was granted limited legality, albeit under strict military supervision. The comparison reveals that Islamic education functioned not only as a medium for religious knowledge transmission but also as a tool for social mobilization and resistance. This study recommends further research into the long-term impacts of colonial strategies on post-independence Islamic education systems. It is hoped that this research contributes to the historical discourse of Islamic education and strengthens the development of a national education system rooted in Islamic and national values.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam adalah salah satu instrumen sangat penting dalam menjaga identitas keagamaan, budaya, dan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia selama periode penjajahan. Dalam konteks kolonialisasi, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian pengetahuan agama, tetapi juga menjadi wadah perlawanan terhadap pengaruh ideologis dan politik dari pihak kolonial. Sejak awal, pemerintah kolonial Belanda melihat pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah, sebagai suatu tantangan bagi stabilitas kekuasaannya. Di sisi lain, Jepang yang menjajah Indonesia



dalam periode yang lebih singkat (1942–1945) mengambil pendekatan yang berbeda dengan memanfaatkan lembaga-lembaga Islam sebagai alat untuk propaganda dan penggerakan massa demi kepentingan Perang Asia Timur Raya (Azra, 2015).

Perbandingan antara masa penjajahan Belanda dan Jepang menunjukkan dinamika pendekatan kekuasaan terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Belanda lebih represif, membatasi ruang gerak pesantren, dan hanya mengakui sekolah-sekolah yang mengikuti sistem pendidikan Barat. Sementara itu, Jepang bersikap lebih pragmatis dengan memberikan ruang bagi pendidikan Islam secara terbatas, namun tetap mengendalikannya melalui sistem pengawasan dan propaganda militer. Meski berbeda strategi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengontrol kesadaran masyarakat Muslim dan mencegah munculnya gerakan perlawanan berbasis agama (Iskandar & Ansori, 2022). Kedua periode penjajahan ini menunjukkan bagaimana pendidikan Islam dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, yang berimplikasi pada perkembangan komunitas Muslim di Indonesia. Pendidikan Islam yang berkembang dalam konteks ini mencerminkan bagaimana interaksi antara kekuasaan dan masyarakat dapat membentuk dinamika sosial yang lebih luas dalam sejarah Islam di Indonesia (Jaelani, 2020).

| 29

Berdasarkan konteks yang ada, pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang terkait pendidikan Islam di Indonesia? Apa efek dari kebijakan kolonial tersebut pada keberadaan institusi pendidikan Islam? Bagaimana kedua penjajah tersebut melakukan perbandingan dalam manajemen pendidikan Islam? Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam; Mengenali pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap perkembangan pesantren serta madrasah; Membandingkan cara kedua penjajah dalam aspek politik pendidikan Islam; Memberikan sumbangan ilmiah untuk studi sejarah pendidikan Islam dan upaya ketahanan budaya umat Islam selama masa kolonial.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas topik ini, seperti karya Deliar Noer (1996) (Noer, 1996) yang meneliti gerakan modern Islam dan peranannya dalam pendidikan, serta Martin van Bruinessen (1994) (Bruinessen, 1995) yang menyoroti posisi pesantren dalam sistem sosial kolonial. Namun, kajian yang secara komprehensif membandingkan kebijakan pendidikan Islam pada masa Belanda dan Jepang masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan historis-komparatif guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai posisi pendidikan Islam dalam dua rezim kolonial yang berbeda secara ideologis maupun strategis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada sejarah, yang bertujuan untuk membangun kembali kenyataan di masa lalu dengan cara yang kritis dan teratur. Kuntowijoyo menyatakan bahwa pendekatan historis tidak hanya berfokus pada urutan kejadian, tetapi juga pada pemahaman mengenai struktur dan arti dari peristiwa sejarah tersebut (Kuntowijoyo, 2003). Oleh karena itu, pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan pendidikan Islam selama periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang dengan lebih mendalam.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis historiografi kritis, yaitu mengkaji berbagai narasi sejarah dari sumber-sumber utama maupun sekunder, serta



melakukan analisis kritis terhadap posisi ideologis dari penulis atau lembaga yang menciptakan sumber tersebut. Penelitian ini juga berbentuk komparatif, di mana dilakukan perbandingan mengenai kebijakan dan praktik pendidikan Islam di dua periode koloni yang berbeda untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Tipe penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian perpustakaan (library research). Sumber primer mencakup arsip-arsip pemerintah kolonial, dokumen pendidikan resmi, peraturan hukum kolonial, serta catatan dari misi Kristen yang beroperasi selama masa penjajahan. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku-buku sejarah, disertasi, artikel penelitian, dan karya-karya para sejarawan seperti Deliar Noer, Karel A. Steenbrink, dan Martin van Bruinessen (Bruinessen, 1995).

| 30

Teknik yang digunakan dalam analisis data dilakukan dengan cara interpretatif serta analisis isi, yang mempertimbangkan konteks sosial-politik dari setiap periode penjajahan. Taufik Abdullah menyatakan bahwa pemahaman tentang sejarah tidak akan lengkap jika tidak dihubungkan dengan konteks sosial yang ada di sekitarnya (Abdullah, 1996). Oleh sebab itu, analisis dalam studi ini juga menekankan cara kekuasaan kolonial memengaruhi kebijakan pendidikan sesuai dengan kepentingan ideologis dan politik. Untuk memastikan keakuratan temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan beragam tipe sumber untuk memastikan keabsahan dan menghindari pandangan yang sempit (Gottschalk, 1986). Mengingat sebagian besar materi kolonial ditulis dari sudut pandang penjajah, penting untuk melakukan pembacaan kritis dan menggunakan pendekatan dekolonial agar interpretasi sejarah dapat menjadi lebih adil dan objektif (Trouillot, 1995).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Pemerintah kolonial Belanda menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Di satu sisi, mereka menyadari betapa besar pengaruh Islam terhadap penduduk lokal dan berusaha mengawasi kegiatan keagamaan untuk mencegah munculnya perlawanan politik. Di sisi lain, Belanda melihat pendidikan Islam, terutama yang berlangsung di pesantren dan surau, sebagai jenis pendidikan informal yang tidak memenuhi kriteria Barat, sehingga perlu diawasi dan dibatasi (Steenbrink, 1986). Sejak awal abad ke-19, Belanda secara terencana melaksanakan kebijakan politik etis yang mencakup tiga program utama: pengairan, emigrasi, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem Barat (seperti HIS, MULO, dan AMS) yang sering kali mengabaikan nilai-nilai keislaman (Leur, 1955). Pendidikan Islam tidak diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional dan dianggap lebih rendah. Akibatnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional beroperasi di lingkungan sosial yang sempit dan sering kali dicurigai sebagai tempat penyebaran ide-ide anti-kolonial.

Sikap yang menekan ini menjadi lebih jelas dengan diterapkannya kebijakan Ordonansi Guru pada tahun 1905 dan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932. Kebijakan ini mengharuskan guru agama untuk mendapatkan izin dari pihak pemerintah sebelum mengajar dan mewajibkan sekolah swasta untuk melaporkan kegiatan mereka. Penolakan terhadap kebijakan ini sangat kuat dari kalangan ulama, terutama yang berasal dari pesantren dan organisasi Islam seperti Sarekat Islam dan Nahdlatul Ulama. Bantahan ini



tidak hanya menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bersama di kalangan umat Islam mengenai pentingnya pendidikan sebagai alat untuk berjuang (Faris, 2014).

Dalam situasi yang penuh tekanan dari pihak kolonial, muncul gerakan reformasi Islam seperti Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912. Gerakan ini berupaya memper modernisasi sistem pendidikan Islam dengan pendekatan yang lebih rasional. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Islam yang terorganisasi dengan baik, memiliki struktur administratif yang jelas, dan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum (Alfian, 1986). Organisasi ini memanfaatkan peluang dalam kebijakan Belanda untuk mengembangkan pendidikan alternatif yang lebih terstruktur, meskipun tetap dalam pengawasan yang ketat. Selain Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU) juga berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berbasis pesantren dan madrasah. NU, yang didirikan pada tahun 1926, melestarikan sistem pesantren tradisional dengan menekankan pentingnya penguatan akidah Ahlul sunnah wal Jama'ah serta pemahaman kitab kuning (Bruinessen, 1995). Meskipun mengalami tekanan dari pemerintahan kolonial, pesantren tetap menjadi benteng utama dalam pendidikan Islam dan pengembangan karakter umat.

Secara umum, pendidikan Islam selama masa penjajahan Belanda berlangsung dalam situasi yang penuh tantangan, namun tetap menunjukkan daya tahan dan adaptasi. Lembaga-lembaga Islam berhasil mempertahankan keberadaannya melalui strategi penyesuaian, perlawanan, dan inovasi (Azra, 2004). Ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bukan hanya institusi pembelajaran, tetapi juga wadah untuk perjuangan ideologis dan identitas budaya bangsa Indonesia.

b. Pendidikan Islam pada Masa Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) membawa dampak besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Berbeda dengan Belanda yang bersikap represif terhadap institusi pendidikan Islam, Jepang memilih metode yang lebih praktis. Metode ini bukan didasarkan pada penghormatan terhadap agama Islam, melainkan sebagai langkah politik untuk menarik perhatian umat Muslim demi mendukung kepentingan militer Jepang selama Perang Asia Timur Raya (Sato, 1994). Sejak awal masa pemerintahannya, Jepang menutup lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda dan menggantinya dengan sistem baru yang dikendalikan secara ketat. Namun, tidak seperti Belanda, Jepang memberikan lebih banyak kebebasan bagi simbol-simbol keislaman di ruang publik. Bahasa Arab diajarkan di sekolah-sekolah, pengajian massal diadakan, dan tokoh-tokoh Islam diberikan tempat dalam organisasi seperti Shumubu dan Masyumi (Shiraishi, 1997). Organisasi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang didirikan oleh Jepang pada tahun 1943, menjadi wadah bagi pengorganisasian umat Islam di bawah pengawasan Jepang (Noer, 1996).

Pemerintah Jepang yang menguasai wilayah tersebut memanfaatkan agama Islam sebagai media untuk menyebarkan propaganda, tetapi di sisi lain tetap menjaga pengawasan ketat terhadap aktivitas para ulama dan pendidikan. Mereka mengerti bahwa ulama memiliki pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat, sehingga menjalin kerjasama dengan pemimpin Islam dianggap krusial demi mencegah pemberontakan dan menjaga keamanan. Dalam situasi ini, pesantren tidak lagi mendapatkan perlakuan buruk



secara langsung, melainkan digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang sejalan dengan ideologi Jepang, seperti disiplin, kesetiaan, dan pengorbanan (Suryanegara, 2009).

Kebijakan yang diterapkan oleh Jepang juga menciptakan kesempatan baru bagi perkembangan madrasah dan pesantren. Beberapa pesantren mengalami peningkatan jumlah santri karena tidak mengalami penekanan seperti pada era Belanda. Di samping itu, ulama seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, dan KH Mas Mansur memperoleh posisi penting dalam struktur keagamaan yang dibentuk oleh Jepang, meskipun tetap dalam pengawasan mereka (Alfian, 1989). Sikap toleran ini menimbulkan berbagai pendapat di kalangan umat Islam, namun juga menjadi modal penting bagi Islam untuk memperkuat posisinya menjelang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam pada era Jepang masih menghadapi berbagai batasan. Rencana belajar diubah sesuai dengan kebutuhan militer Jepang, dan kontrol diterapkan terhadap literatur keislaman. Beberapa buku klasik bahkan mendapat batasan peredaran jika dianggap mengandung unsur yang dapat memicu perlawanan (Ahmad, 1982). Meskipun begitu, keadaan ini tetap dimanfaatkan oleh para ulama dan pemimpin pendidikan Islam untuk memperluas pengaruh sosial, menyebarkan ajaran Islam, dan mencetak generasi muda yang nantinya akan terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan.

Oleh karena itu, masa ketika Jepang menduduki Indonesia menjadi periode krusial dalam perkembangan pendidikan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya leluasa, adanya sedikit kebebasan yang lebih dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat perannya dalam menghadapi perubahan politik yang terjadi selama penjajahan (Steenbrink, 1986).

c. Perbandingan Strategi Kolonial Belanda dan Jepang terhadap Pendidikan Islam

Strategi kolonial Belanda dan Jepang dalam menghadapi pendidikan Islam menunjukkan perbedaan mendasar yang bersumber dari motif ideologis, pendekatan politik, serta konteks global yang melatarbelakangi kekuasaan masing-masing. Jika Belanda cenderung menggunakan pendekatan represif dan eksklusif, maka Jepang lebih mengarah pada kooptasi simbolik dan manipulatif terhadap Islam (Shiraishi, 1997). Pemerintah kolonial Belanda melihat Islam sebagai suatu potensi yang dapat mengganggu kestabilan kekuasaan mereka. Karena itu, mereka berusaha untuk membatasi dan memantau pendidikan Islam, khususnya pesantren, melalui berbagai peraturan seperti Ordonansi Guru (1905) dan Sekolah Liar (1932). Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengontrol penyebaran ajaran Islam dan menghalangi pengaruh politik dari para ulama (Damanhuri, 2024). Di sisi lain, Jepang memiliki pandangan yang lebih strategis terhadap Islam. Dalam situasi Perang Asia Timur Raya, Jepang menggunakan slogan "Asia untuk orang Asia" dan menjadikan Islam sebagai alat propaganda untuk meraih dukungan umat Muslim di Indonesia (Suryanegara, 2009). Berbeda dengan Belanda yang menekan, Jepang justru mendekati ulama dan memberikan dukungan terhadap simbol-simbol keislaman sebagai cara untuk memperoleh legitimasi politik (Sato, 1994). Namun, dukungan tersebut bersifat pragmatis dan berada di bawah pengawasan militer.

Belanda cenderung meremehkan dan menghalangi pengakuan resmi terhadap pesantren dan madrasah. Mereka lebih mengedepankan pembangunan sekolah-sekolah modern untuk golongan priyayi, yang kurikulumnya tidak mengandung unsur Islam. Pesantren beroperasi di luar kontrol negara dan sering kali dicurigai sebagai tempat



perlawanan (Bruinessen, 1995). Sebaliknya, Jepang tidak secara langsung membatasi keberadaan pesantren. Bahkan, di berbagai daerah, pesantren diberi kesempatan untuk tumbuh dengan pengawasan yang ketat. Dalam banyak situasi, Jepang memberikan peluang bagi madrasah dan pendidikan agama untuk berfungsi dalam batas-batas tertentu. Ini memberi harapan baru bagi pendidikan Islam untuk bersatu kembali setelah lama ditekan oleh Belanda (Ahmad, 1982).

| 33

Pada era penjajahan Belanda, tokoh-tokoh seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari berupaya memperkuat institusi pendidikan Islam dengan mendirikan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Usaha mereka dilakukan dalam konteks perlawanan terhadap pemerintahan kolonial (Alfian, 1989). Sedangkan pada masa Jepang, individu-individu seperti KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, dan KH Hasyim Asy'ari mendapatkan posisi penting di lembaga yang tidak nyata seperti Shumubu dan Masyumi. Mereka memiliki dua peran: menjalin kerja sama terbatas dengan Jepang, tetapi tetap menjaga tujuan pendidikan Islam demi kebangkitan umat dan bangsa (Azra, 2017).

Secara keseluruhan, metode represif yang diterapkan oleh Belanda menciptakan perpecahan antara pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Di sisi lain, pendekatan yang diambil oleh Jepang memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang lagi, walaupun di tengah dominasi militer. Meski begitu, pengalaman menghadapi dua jenis penjajahan ini meningkatkan kesadaran umat Islam mengenai pentingnya pendidikan yang mandiri serta perlunya menyatukan antara agama dan identitas bangsa (Noer, 1996).

4. SIMPULAN

a. Simpulan

Penelitian ini menekankan pergerakan pendidikan Islam di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan Jepang, yang merupakan dua periode dengan pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya mencoba mengendalikan lembaga keagamaan untuk tujuan politik dan kekuasaan. Pemerintah Belanda menerapkan cara yang represif dan struktural dengan membelenggu institusi pesantren dan madrasah melalui peraturan yang membatasi aktivitas ulama dan mengesampingkan Islam dalam sistem pendidikan resmi. Di sisi lain, pemerintah Jepang bersikap lebih terbuka terhadap Islam, meskipun tetap didasarkan pada kepentingan pragmatis untuk mendapatkan dukungan dari umat Muslim demi mempertahankan kekuasaan saat Perang Asia Timur Raya.

Pendekatan yang berbeda ini berdampak langsung kepada pertumbuhan pendidikan Islam. Pada masa Belanda, pendidikan Islam berkembang secara mandiri, terpisah dari sistem resmi pemerintahan meskipun dengan tekanan yang berat, tetapi berhasil menghasilkan perlawanan dan inovasi pendidikan dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, pada masa Jepang, kesempatan yang lebih bebas dimanfaatkan oleh para ulama untuk memperkuat lembaga pendidikan, meski tetap di bawah pengawasan dan manipulasi ideologis oleh penjajah.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam dalam kedua rezim kolonial ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ilmu agama, tetapi juga sebagai wadah perjuangan ideologis, sosial, dan nasional. Warisan dari periode kolonial tersebut menjadi dasar yang sangat signifikan bagi perkembangan sistem pendidikan Islam modern setelah Indonesia merdeka.



b. Implikasi

Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan kekuasaan. Tanggapan ulama serta lembaga pendidikan Islam terhadap tekanan kolonial menunjukkan bahwa sistem pendidikan berbasis agama memiliki daya tahan yang tinggi, fleksibilitas dalam beradaptasi, dan potensi besar sebagai kekuatan sosial yang mandiri.

Dampak historis ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional di zaman sekarang. Pemerintah harus memperkuat pengakuan serta integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, tanpa menghilangkan ciri khasnya. Selain itu, pendekatan sejarah yang kritis ini juga memberikan pelajaran bahwa usaha untuk deradikalisasi, moderasi beragama, dan pendidikan karakter bisa bersandar pada dasar-dasar sejarah pendidikan Islam itu sendiri, bukan hanya bergantung pada campur tangan pemerintah.

| 34

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1996). *Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial,*” dalam *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Suatu Perkenalan Awal*. LP3ES.
- Ahmad, Z. A. (1982). *Indonesia di bawah Jepang*. Gunung Agung.
- Alfian. (1986). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Gadjah Mada University Press.
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Gajah Mada University.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Azra, A. (2015). GENEALOGY OF INDONESIAN ISLAMIC EDUCATION: ROLES IN THE MODERNIZATION OF MUSLIM SOCIETY. *Heritage of Nusantara*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31291/hn.v4i1.63>
- Azra, A. (2017). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Damanhuri, dkk. (2024). KETERKAITAN ANTARA POLITIK PENDIDIKAN, KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEKUASAAN SERTA IMPLIKASINYA PADA PRAKTEK PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN (ISLAM). *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 2(1). file:///C:/Users/User/Downloads/648-Article Text-2067-2-10-20240531 (1).pdf
- Faris, S. . (2014). *Resistances in the Restoration of Local Spiritual and Cultural Values in Science Education*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-6209-659-2_9
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. UI Press. <https://www.scribd.com/document/635295090/louis-gottschalk-mengerti-sejarah-pdf>
- Iskandar, K., & Ansori, A. S. (2022). Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i02.61>
- Jaelani, J. (2020). KOMUNITAS DAN INSTITUSI SOSIAL MUSLIM DI INDONESIA (Telaah



- Historis atas Pembentukan dan Perkembangannya). *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 75–84. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.272>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Leur, C. van. (1955). *Indonesian Trade and Society*. Van Hoeve.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES.
- Sato, S. (1994). *War, Nationalism and Peasants: Java under the Japanese Occupation, 1942–1945*. M.E.Sharpe. | 35
- Shiraishi, T. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926*. LP3ES.
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. LP3ES.
- Suryanegara, A. M. (2009). *Api Sejarah, Jilid I*. Salamadani.
- Trouillot, M.-R. (1995). *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Beacon Press. <https://archive.org/details/michel-rolph-trouillot-silencing-the-past-power-and-the-production-of-history-beacon-press-1995/page/n4/mode/1up>